

## BAB 7

# EKONOMI INKLUSIF UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

---

*Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan capaian yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Sejalan dengan Asta Cita, Pemerintah merumuskan program prioritas yang diarahkan untuk mendorong akselerasi ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan pendapatan. Akselerasi pertumbuhan didorong antara lain melalui hilirisasi sumber daya alam, baik mineral maupun nonmineral, sementara pemerataan pendapatan didorong melalui berbagai program kerakyatan. Implementasi program-program ini didukung oleh pembiayaan fiskal dan partisipasi sektor swasta guna memastikan daya dorong terhadap pertumbuhan yang merata. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan berkelanjutan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang didukung dengan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM.*





**K**ebijakan ekonomi inklusif menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan ini, ekonomi inklusif diarahkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ekonomi inklusif mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan peluang berusaha, sehingga memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Inklusivitas juga berperan penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi, memperkuat basis konsumsi domestik, serta menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

**Urgensi penguatan ekonomi inklusif semakin meningkat bagi Indonesia seiring tantangan struktural yang dihadapi.** Di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian, strategi pertumbuhan yang mengedepankan inklusivitas menjadi krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menetapkan berbagai program prioritas sebagai implementasi dari Visi Misi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dan inklusivitas guna mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Selaras dengan upaya tersebut, Bank Indonesia turut mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkeadilan melalui bauran kebijakan utama dan kebijakan pendukung untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat transmisi kebijakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## 7.1. Kebijakan Umum dalam Mendukung Ekonomi Inklusif

**Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mensyaratkan laju pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga struktur ekonomi yang inklusif untuk menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.** Ekonomi yang inklusif ditandai dengan pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, kesempatan kerja,

---

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mensyaratkan laju pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga struktur ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

---

serta peluang ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat. Akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan akan menciptakan SDM yang terampil dan produktif untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan peluang usaha. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha mendorong masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan merata, yang selanjutnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, pendapatan yang memadai akan memperkuat konsumsi rumah tangga dan mendorong optimalisasi kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, pendapatan yang layak akan memberikan kesempatan berinvestasi pada pendidikan yang lebih baik, sehingga SDM akan menjadi lebih berkualitas, produktif, dan inovatif. Peningkatan produktivitas dan inovasi SDM ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menciptakan siklus positif (*virtuous cycle*) dalam perekonomian nasional.

**Pemerintah menempuh berbagai kebijakan dan program prioritas nasional yang didukung oleh kebijakan fiskal yang terarah dan berkelanjutan guna memperkuat ekonomi inklusif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan merata.** Kebijakan tersebut mencakup percepatan hilirisasi sumber daya alam, baik mineral maupun pertanian, sebagai strategi transformasi struktural untuk meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memperluas penciptaan lapangan kerja (Kemenko Perekonomian, 2024). Sejalan dengan itu, Pemerintah memperkuat program ekonomi kerakyatan dan sosial produktif, antara lain



penguatan ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan kesejahteraan, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta program pembangunan tiga juta rumah untuk mendukung sektor perumahan dan industri terkait (Presiden RI, 2024). Keseluruhan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran UMKM, meningkatkan daya serap tenaga kerja, serta memperluas basis permintaan domestik, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga menopang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Berbagai studi literatur juga menunjukkan pertumbuhan yang inklusif tidak hanya membutuhkan dukungan kebijakan fiskal, tetapi juga dukungan kebijakan moneter karena kualitas dan distribusi pertumbuhan sangat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang merupakan mandat utama bank sentral.**

Literatur menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya mengurangi keberlanjutan pertumbuhan jangka menengah tetapi juga melemahkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui saluran konsumsi dan kredit (Ostry et al., 2014; Dabla-Norris et al., 2016; Ampudia et al., 2018; Furceri et al., 2017; Borio, 2014). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dan konsumsi akan mendukung pencapaian stabilitas harga karena permintaan agregat tumbuh lebih stabil dan volatilitas bisnis berkurang dalam lingkungan yang inklusif. Sementara itu, inklusi keuangan yang antara lain ditandai dengan akses kredit dan instrumen pembayaran yang merata dapat memperkuat ketahanan rumah tangga dan UMKM terhadap guncangan, sehingga menurunkan risiko sistemik dan menguatkan stabilitas sistem keuangan (Demirgüç-Kunt & Martínez Pería, 2012; World Bank, 2014; World Bank, 2022). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan peran bank sentral sebagai otoritas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran.

Bank Indonesia mendukung pertumbuhan yang inklusif dan hijau melalui kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta kebijakan pendukung bagi UMKM dan ekonomi hijau. Di sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan dan menjaga likuiditas di pasar keuangan serta mengoptimalkan bauran kebijakan dengan Pemerintah untuk mengendalikan harga. Di sisi makroprudensial, Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan mendorong transmisi dari sektor keuangan ke sektor riil berjalan efektif, antara lain melalui kebijakan insentif ke sektor prioritas dan UMKM termasuk pembiayaan hijau. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap berorientasi pada stabilitas. Di sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi pembayaran antara lain pengembangan QRIS yang memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani serta menurunkan biaya transaksi. Selain melalui kebijakan utama, Bank Indonesia juga mendorong inklusivitas pertumbuhan dengan kebijakan pendukung antara lain pengembangan kluster UMKM dan kluster pangan di seluruh wilayah Indonesia.

## 7.2. Program Prioritas Pemerintah untuk Pertumbuhan Inklusif

Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sebagai mandat utama pembangunan nasional, yang berlandaskan visi dan misi Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita. Pertumbuhan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan *output* agregat, tetapi juga sebagai proses pembangunan yang mampu menurunkan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Melalui program prioritas, pembangunan nasional tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan secara adil



oleh seluruh masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan tidak memberikan nilai strategis bagi bangsa, dan bahwa pembangunan “harus menjamin pertumbuhan sekaligus kesejahteraan bagi seluruh rakyat”.

Visi jangka menengah tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. RPJMN 2025–2029 menetapkan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan program lintas kementerian/ lembaga sebagai pijakan implementasi agenda nasional (Bappenas, 2025). Pelaksanaan program pembangunan setiap tahunnya selanjutnya didukung oleh kebijakan fiskal yang terintegrasi dalam APBN, serta diperkuat melalui pemanfaatan instrumen pembiayaan publik dan partisipasi swasta, guna memastikan agenda pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dapat dijalankan secara konsisten.

### 7.2.1. Asta Cita dan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Asta Cita merupakan delapan misi Presiden untuk periode 2025–2029 yang dirumuskan sebagai instrumen utama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 (Gambar 7.1.). Delapan misi ini menjadi arah pembangunan nasional

dan menekankan transformasi struktural melalui penguatan SDM, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, reformasi sistem pelayanan publik, serta penguatan pertahanan dan tata kelola, yang kemudian dioperasionalkan melalui 17 program strategis Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 (Dokumen RPJMN Tahun 2025–2029, Bappenas). Inkorporasi Asta Cita dilakukan untuk memastikan konsistensi antara arah jangka menengah dan tujuan jangka panjang pembangunan sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan manusia, transformasi ekonomi termasuk hilirisasi industri, ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan dijalankan secara terintegrasi dan lintas sektor. Dalam kerangka ini, Asta Cita berperan menyelaraskan agenda pembangunan manusia, transformasi ekonomi, ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan, sementara 17 program strategis Presiden dalam RPJMN menjadi instrumen implementatif lintas sektor dan kementerian/ lembaga.

Asta Cita tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pemerataan agar manfaat pembangunan dirasakan luas. Untuk sisi pertumbuhan, Pemerintah mendorong hilirisasi berbasis

Gambar 7.1. Visi Misi Presiden 2025-2029



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Bappenas

sumber daya mineral dan pertanian karena Indonesia masih banyak mengekspor komoditas mentah dan belum memaksimalkan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi ini diharapkan memperkuat industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja sehingga menjadi sumber pertumbuhan yang lebih inklusif. Di sisi pemerataan, Pemerintah menjalankan program kerakyatan seperti MBG, peningkatan mutu pendidikan, reformasi kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, serta perlindungan sosial untuk memperkuat kualitas SDM dan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, Asta Cita diarahkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mengawal target pertumbuhan jangka panjang, RPJMN 2025–2029 ditetapkan sebagai kerangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang secara eksplisit difokuskan pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJMN menegaskan bahwa periode 2025–2029 diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi yang memungkinkan percepatan pembangunan untuk tahap RPJPN berikutnya (Gambar 7.2.). APBN 2025, yang berfungsi sebagai APBN transisi, menjadi instrumen utama untuk menyelaraskan agenda pembangunan pemerintahan baru dengan kesinambungan kebijakan yang sudah berjalan, terutama terkait stabilitas makro dan konsolidasi fiskal.

Pada tahun 2025 atau awal RPJMN tahap 1, implementasi program prioritas diarahkan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kualitas belanja publik melalui penyusunan regulasi pendukung dan harmonisasi program lintas kementerian. Pada tahap ini, Pemerintah mulai mengejar target indikator RPJMN, seperti penurunan *stunting* ke 18,8%, peningkatan nilai *Programme for International Student Assessment* (PISA), dan peningkatan usia harapan hidup menjadi 74,43 tahun pada 2025 dari 72,13 di tahun 2024. Penekanan pada penguatan fondasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perluasan program dan percepatan pembangunan pada periode berikutnya dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Memasuki periode pertengahan RPJMN tahap 1, pelaksanaan program diarahkan untuk menjangkau skala yang lebih luas dan menghasilkan percepatan capaian pembangunan. Pemerintah menekankan implementasi penuh dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang mencakup penguatan pangan, energi bersih, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dasar, transformasi digital pemerintahan, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. Pada periode ini, indikator makro bergerak menuju sasaran antara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,3% pada 2026 dan 7,5% pada 2027, penurunan angka tingkat kemiskinan menuju

Gambar 7.2. Tahapan RPJMN dan RPJPN



Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Bappenas



5-7%, serta perbaikan rasio Gini menuju kisaran 0,375–0,382. Seluruh dinamika tersebut terbentuk di tengah kebutuhan investasi pembangunan sebesar Rp47.573,45 triliun selama periode 2025–2029, di mana lebih dari 86% diharapkan berasal dari pembiayaan non-APBN.

Pada periode akhir RPJMN tahap 1, hasil dari serangkaian intervensi mulai memperlihatkan dampak struktural terhadap produktivitas, kualitas SDM, pemerataan pembangunan, dan ketahanan ekonomi nasional. Perbaikan kualitas pendidikan melalui asesmen nasional dan PISA, peningkatan layanan kesehatan dasar melalui perluasan puskesmas dan rumah sakit daerah, integrasi layanan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan pertanian dan energi domestik memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8,0% pada 2029, kemiskinan turun ke 4,5–5,0%, *stunting* menurun hingga 14,2%, dan pendalaman pasar keuangan menghasilkan rasio aset sektor keuangan terhadap PDB sekitar 213,6%. Selain itu, pembangunan wilayah juga diarahkan untuk mendorong konvergensi pertumbuhan antarwilayah, terutama melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan digital.

Keseluruhan fase pembangunan jangka menengah ini menggambarkan bagaimana Asta Cita dioperasionalkan secara bertahap, terukur, dan konsisten dengan sasaran RPJPN 2025–2045. Keberhasilan perjalanan lima tahun ini sangat bergantung pada efektivitas tata kelola, kualitas koordinasi pusat–daerah, peningkatan kapasitas pembiayaan, dan kemampuan Pemerintah memobilisasi investasi swasta secara lebih besar dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, peran APBN tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen katalitik untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha, menurunkan risiko investasi, dan mendorong partisipasi sektor non-Pemerintah secara berkelanjutan.

---

Program prioritas nasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045

---

## 7.2.2. Implementasi Asta Cita dalam Program Prioritas Pemerintah

Untuk mendukung implementasi Asta Cita, APBN 2025 dirancang untuk memberikan dukungan fiskal khususnya untuk 8 (delapan) program prioritas. Dengan demikian, APBN 2025 berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang memastikan bahwa visi Presiden dalam Asta Cita diterjemahkan secara konkret dan dieksekusi secara terfokus melalui alokasi anggaran negara (Kemenkeu, 2025). Adapun tujuan akhir dari program-program tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana dirancang dalam kerangka perencanaan nasional oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Delapan agenda prioritas APBN 2025 tersebut adalah: (1) program ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) program makan bergizi gratis (MBG), (4) peningkatan mutu pendidikan, (5) reformasi sistem kesehatan, (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, (7) pertahanan semesta, serta (8) akselerasi investasi, perdagangan, dan perumahan, yang masing-masing merupakan penajaman fiskal dari Asta Cita dan program strategis RPJMN.

Program prioritas pertama adalah program ketahanan pangan yang ditempatkan sebagai prioritas karena pandemi dan gangguan rantai pasok global telah menunjukkan kerentanan sistem pangan nasional. Kerentanan tersebut tecermin dari tingginya ketergantungan pada impor pangan strategis, volatilitas harga yang tinggi, keterbatasan kapasitas logistik dan penyimpanan pangan, serta ketimpangan distribusi antarwilayah yang menyebabkan disparitas harga dan akses pangan. Melalui program ini, Pemerintah bertujuan memperkuat

ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen pangan domestik. Hal ini sejalan dengan target peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 2025 di kisaran 115–120 dan penguatan posisi produsen pangan domestik dalam rantai pasok nasional. Per Desember 2025, realisasi NTP telah mencapai 125,35.

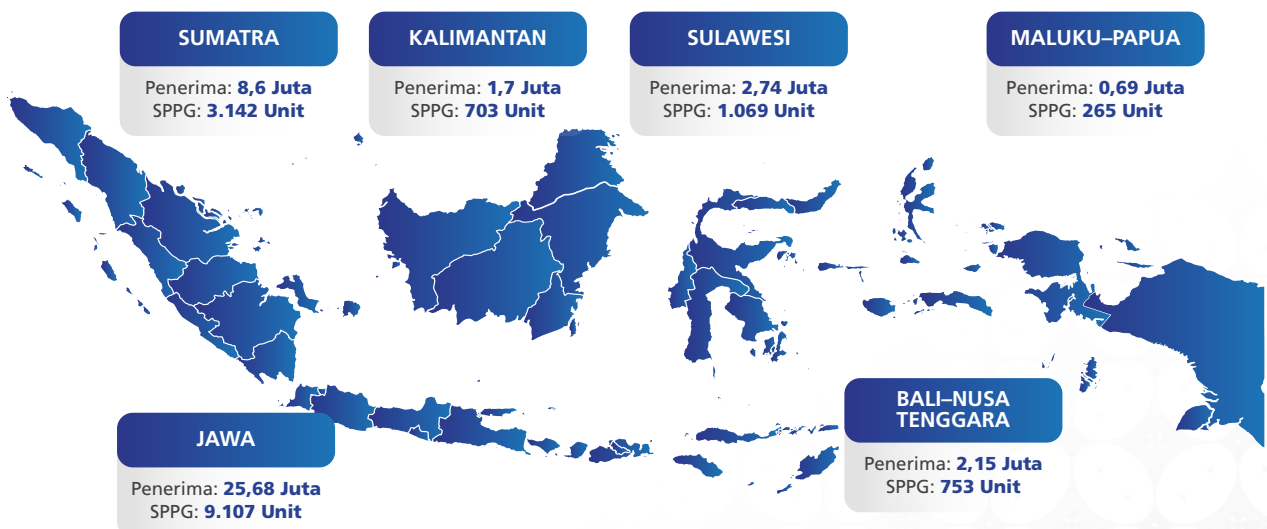
**Program prioritas kedua adalah program ketahanan energi yang difokuskan pada stabilitasi harga dan keterjangkauan energi bagi masyarakat serta dunia usaha.** Program ini diarahkan terutama melalui pemberian kompensasi dan subsidi energi untuk menjaga daya beli rumah tangga, mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, serta menahan dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik. Selain itu, kebijakan ketahanan energi juga dimaksudkan untuk menjamin kontinuitas pasokan energi yang andal dan terjangkau, khususnya energi listik dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hingga Desember 2025, telah tersalurkan subsidi/kompensasi energi listrik kepada 42,8 juta pelanggan listrik bersubsidi.

**Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inovasi penting yang ditempatkan sebagai program prioritas ketiga.** Program ini dirancang untuk menjangkau anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil, sehingga

memiliki efek ganda terhadap peningkatan kualitas gizi, pencegahan *stunting*, dan peningkatan partisipasi sekolah. Dari perspektif pertumbuhan inklusif, program ini memperkuat kualitas SDM Indonesia sejak usia dini dan mengurangi kesenjangan sosial antarkelompok pendapatan. Hingga Desember 2025, program MBG telah menjangkau sekitar 53,8 juta penerima manfaat dan didukung oleh lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah (Gambar 7.3.). Dari perspektif pertumbuhan inklusif, capaian ini menunjukkan perluasan akses layanan gizi yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SDM dan pengurangan kesenjangan sosial antarkelompok pendapatan.

**Pemerintah mengarahkan agar sektor pendidikan dapat menjadi instrumen utama untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung transformasi ekonomi berbasis pengetahuan sehingga ditetapkan sebagai program prioritas keempat.** Fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Upaya ini tecermin dari penguatan program peningkatan mutu sekolah, pengembangan sekolah unggulan, serta revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Gambar 7.3. Penerima MBG dan Jumlah SPPG Secara Spasial



Keterangan: Data s.d. 30 November 2025  
Sumber: APBN Kita, Kementerian Keuangan



Dalam kerangka RPJMN, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan tecermin pada perbaikan capaian *learning outcomes*, termasuk peningkatan skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan penurunan kesenjangan pendidikan antardaerah. Hingga Desember 2025, program ini telah menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa lainnya kepada 21,5 juta pelajar penerima, bantuan Gaji/Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Tunjangan Profesi Dosen (TPD) kepada 1,4 juta guru/dosen non-ASN, serta dari sisi infrastruktur telah direvitalisasi 12,5 ribu sekolah dan telah dibentuk 166 sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda.

**Program prioritas kelima adalah program kesehatan terutama ditujukan untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam menangani penyakit menular dan tidak menular, memperluas jangkauan jaminan kesehatan, serta mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan.**

Penguatan sistem kesehatan ini bertujuan memperkuat kapasitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional, serta menjamin keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Program ini menekankan perluasan layanan promotif dan preventif, termasuk deteksi dini penyakit, penanganan *stunting*, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Hingga Desember 2025, layanan cek kesehatan gratis telah menjangkau 80 juta penduduk dan dilaksanakan pada 10.095 puskesmas (98,3% dari total Puskesmas) di 510 kabupaten/kota (99,2% dari total kabupaten/kota). Capaian ini menunjukkan penguatan jangkauan layanan kesehatan dasar sebagai fondasi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

**Program prioritas keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.** Dengan desain prioritas penggunaan yang semakin diarahkan pada kegiatan produktif, kemudahan akses pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial di level akar rumput. Pembangunan desa, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan UMKM difasilitasi

antara lain melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendapatan masyarakat desa, dan percepatan konvergensi pembangunan antarwilayah. Hingga Desember 2025, penerima KUR telah mencapai 4,6 juta debitur dan 100 kelompok masyarakat terkait kampung nelayan, penggarapan nasional, dan budidaya ikan nila salin.

**Stabilitas dan keamanan yang terjaga menjadi prasyarat penting bagi iklim investasi dan perdagangan yang kondusif dan ditetapkan sebagai program prioritas ketujuh.** Program pertahanan semesta yang mencakup pertahanan (Kemenhan dan TNI), keamanan (Polri, BIN, dan BNN), dan hukum (KPK, Kejaksaan RI, dan Peradilan) dipertegas untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Penguatan pertahanan semesta diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan nasional, modernisasi sistem pertahanan, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri. Stabilitas yang terjaga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

**Program prioritas kedelapan adalah akselerasi investasi dan penguatan daya saing perdagangan global yang menjadi agenda strategis Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.** Pemerintah membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai motor penggerak investasi untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok dunia. Penguatan investasi ini berjalan berdampingan dengan percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui target penyediaan tiga juta rumah yang didukung oleh berbagai skema pembiayaan, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk kawasan desa, kota, dan pesisir, serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi rumah komersial agar tetap terjangkau. Hingga Desember 2025, realisasi program FLPP mencapai 278,9 ribu rumah atau hampir 80% dari target sebanyak 350 ribu rumah.

### 7.2.3. Sumber Pembiayaan Program Prioritas Kerakyatan: Fiskal dan Swasta

Program prioritas kerakyatan dalam Asta Cita dibiayai melalui kombinasi sumber fiskal dan pembiayaan swasta. Dari sisi fiskal, penggunaan APBN menunjukkan bahwa ruang fiskal dimanfaatkan secara aktif namun tetap terkendali. Pada rancangan APBN 2025, belanja negara meningkat menjadi sekitar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sekitar Rp3.005,1 triliun dan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% PDB, lebih ekspansif dibandingkan dengan APBN tahun 2024. Namun demikian, APBN 2025 tetap berada dalam batas maksimal defisit, yaitu masih di bawah 3% PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sampai dengan akhir Desember 2025 defisit fiskal mencapai 2,92% dengan realisasi pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp2.756,3 triliun dan Rp3.451,4 triliun.

APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusi, dan keberlanjutan. Hal ini tecermin dari acuan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, tingkat pengangguran sebesar 4,5-5,0%, dan kemiskinan ekstrem sebesar 0% (Tabel 7.1.). Kebijakan ini sesuai dengan tujuan pemerintahan baru yang telah menetapkan delapan agenda prioritas nasional, yang juga dikenal sebagai Asta Cita, sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Komposisi

belanja negara memperlihatkan fokus kuat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial, dengan alokasi pendidikan sekitar 20% dari belanja Pemerintah Pusat atau Rp724,3 triliun, perlindungan sosial sekitar 13,9% atau Rp503,2 triliun, infrastruktur sekitar 9% atau Rp324,6 triliun, serta kesehatan sekitar 6% atau Rp218,5 triliun.

Sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan, APBN 2025 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas Asta Cita. Hal ini dilakukan agar implementasi agenda prioritas tersebut menghasilkan dampak yang maksimal dalam memperkuat fondasi pertumbuhan inklusif. Uraian berikut menggambarkan bagaimana masing-masing agenda Asta Cita didukung melalui belanja fiskal dan realisasinya sepanjang tahun 2025 (Tabel 7.2.). Sampai dengan akhir Desember 2025, realisasi belanja negara untuk program-program prioritas berkisar antara 70% sampai dengan 95%. Capaian beberapa subprogram ketahanan pangan dan pendidikan bahkan mencapai 100% antara lain pada penyaluran subsidi Bulog dan cadangan pangan, penyaluran PIP/KIP kuliah/beasiswa lainnya, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara itu, capaian realisasi program unggulan seperti MBG juga cukup tinggi yang mencapai 74,5%. Berikut detail dari realisasi program prioritas Pemerintah di tahun 2025.

Tabel 7.1. APBN dan Target Pembangunan

No.	Indikator	Realisasi APBN 2024	Rancangan APBN 2025	Realisasi APBN 2025	Keterangan singkat
1	Pendapatan negara (triliun Rp)	2.842,5	± 3.005,1	2.756,3	Kenaikan pendapatan sejalan dengan basis pajak yang melebar
2	Belanja negara (triliun Rp)	3.350,3	± 3.621,3	3.451,4	Belanja 2025 lebih ekspansif untuk program prioritas
3	Defisit nominal (triliun Rp)	507,8	± 616,2	695,1	Masih dalam koridor disiplin fiskal
4	Defisit (% PDB)	2,29	2,53	2,92	Defisit tetap di bawah 3 persen PDB
5	Target pertumbuhan ekonomi (%)	5,03	5,2	-	Target 2025 lebih tinggi dari realisasi 2024
6	Target Pengangguran (%)	5,0–5,7	4,5–5,0	4,5–5,0	Penajaman sasaran tingkat pengangguran
7	Kemiskinan Ekstrem (%)	0–1	0	0	Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Bappenas, Kementerian Keuangan



Tabel 7.2. Rincian Realisasi Program Prioritas

No.	Program Prioritas (Asta Cita)	Target 2025 (Rp triliun)	Realisasi 2025 (Rp triliun)	%
1	Ketahanan Pangan	146,6	131,2	89,5
	a. Subsidi KUR dan pupuk	104,5	96,4	92,2
	b. Lumbung pangan	20,0	12,7	63,5
	c. Bulog dan cadangan pangan	22,1	22,1	100,0
2	Ketahanan Energi (Subsidi)	394,3	305,2	77,4
3	Makan Bergizi Gratis (MBG)	71,0	51,5	72,5
4	Pendidikan	80,1	75,5	94,3
	a. PIP/KIP kuliah/beasiswa lainnya	27,7	27,7	100,0
	b. TPG/TPD non-PNS	22,2	22,2	100,0
	c. Sekolah rakyat & unggulan Garuda	10,2	6,7	65,7
	d. Renovasi/revitalisasi sekolah	20,0	18,9	94,5
5	Kesehatan	55,8	50,8	91,0
	a. Bantuan iuran PBI JKN	46,5	46,3	99,6
	b. Cek kesehatan gratis & TB, Revitalisasi 32 RS	9,3	6,5	69,9
6	Desa, Koperasi & UMKM	40,4	34,0	84,2
7	Pertahanan Semesta	245,2	102,2	41,7
8	Investasi & Perumahan (FLPP)	35,2	29,2	83,0

Note = Realisasi s.d. Desember 2025 kecuali untuk nomor 7 yang menggunakan realisasi s.d. Semester I-2025  
Sumber: APBN Kita Desember 2025, Kementerian Keuangan

### 1. Program ketahanan pangan

Dalam APBN 2025, belanja yang dikategorikan untuk ketahanan pangan tercatat sekitar Rp146,6 triliun dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 mencapai Rp131,2 triliun, yang mencakup dukungan produksi, distribusi, stabilisasi harga, dan penguatan cadangan pangan. Di atas fondasi ini, APBN 2025 mengarahkan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas, yakni kedaulatan pangan, dengan memperkuat pembiayaan untuk irigasi, penyuluhan, hilirisasi hasil pertanian, serta logistik pangan.

### 2. Program ketahanan energi

Pada 2025, berbagai skema subsidi dan kompensasi energi, termasuk subsidi BBM dan listrik dialokasikan sekitar Rp394,3 triliun dengan realisasi sebesar Rp305,2 triliun untuk 42,8 juta pelanggan listrik bersubsidi (s.d. Desember 2025).

Hal ini menjadi instrumen yang penting untuk menjaga daya beli rumah tangga, meningkatkan daya saing industri, dan stabilitas inflasi.

### 3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam APBN 2025, Pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini, yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan dan perlindungan sosial. Hingga Desember 2025, realisasi program ini telah mencapai Rp51,5 triliun dengan 53,8 juta orang penerima dan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

### 4. Program pendidikan

Alokasi anggaran untuk program prioritas pendidikan tercatat sebesar Rp80,1 triliun dengan realisasi anggaran hingga Desember 2025 sebesar Rp75,5 triliun. Program ini menunjukkan penguatan fokus terhadap kualitas



pembelajaran, pemerataan akses, serta integrasi program MBG sebagai bagian dari ekosistem sekolah. Anggaran pendidikan tersebut telah dimanfaatkan untuk siswa/mahasiswa sebesar Rp27,7 triliun, untuk guru/dosen/tenaga pendidik non-ASN sebesar Rp22,2 triliun. Untuk realisasi sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda telah mencapai Rp6,7 triliun, dan realisasi belanja revitalisasi sekolah telah mencapai Rp18,9 triliun untuk revitalisasi 12,5 ribu sekolah/madrasah.

## 5. Program kesehatan

Pada 2025, Pemerintah mengalokasikan Rp55,8 triliun dengan realisasi mencapai Rp50,8 triliun hingga Desember 2025 yang difokuskan pada penurunan *stunting* dan penguatan layanan kesehatan dasar melalui cek kesehatan gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan penanganan *Tuberculosis* (TB). Untuk CKG dan skrining TB, telah dilakukan pemeriksaan kepada 80 juta orang.

## 6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM

Pada 2025, alokasi anggaran mencapai Rp40,4 triliun dengan realisasi hingga Desember 2025 tercatat mencapai Rp34,0 triliun, melalui subsidi bunga KUR dan program dukungan K/L. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memutus rantai kemiskinan melalui penguatan akses pembiayaan, fasilitasi usaha, dan dukungan kelembagaan. Program penyaluran subsidi bunga KUR ini telah membantu 4,6 juta debitur UMKM produktif di seluruh Indonesia.

## 7. Pertahanan semesta

Pada 2025, alokasi anggaran pertahanan semesta mencapai sekitar Rp376,4 triliun, meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp331,9 triliun. Untuk anggaran pertahanan, pada semester I-2025 terdapat kenaikan pagu anggaran dari Rp166,1 triliun menjadi 245,2 triliun dengan realisasi yang mencapai Rp102,2 triliun.<sup>19</sup> Peningkatan ini mencerminkan orientasi Pemerintah untuk mengembangkan pertahanan

yang menyeluruh dengan memperkuat personel, modernisasi alutsista, dan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

## 8. Akselerasi investasi dan penguatan daya saing perdagangan global

Pada 2025 total target rumah yang diproyeksikan memperoleh dukungan FLPP mencapai 350.000 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp35,2 triliun. Sampai dengan akhir Desember 2025, realisasi FLPP mencapai Rp29,2 triliun untuk pembiayaan 278,9 ribu unit rumah. Target dan capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak dan mendorong aktivitas ekonomi melalui sektor konstruksi.

**Sumber pembiayaan swasta juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, terutama untuk program yang berkaitan dengan akselerasi investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perumahan.**

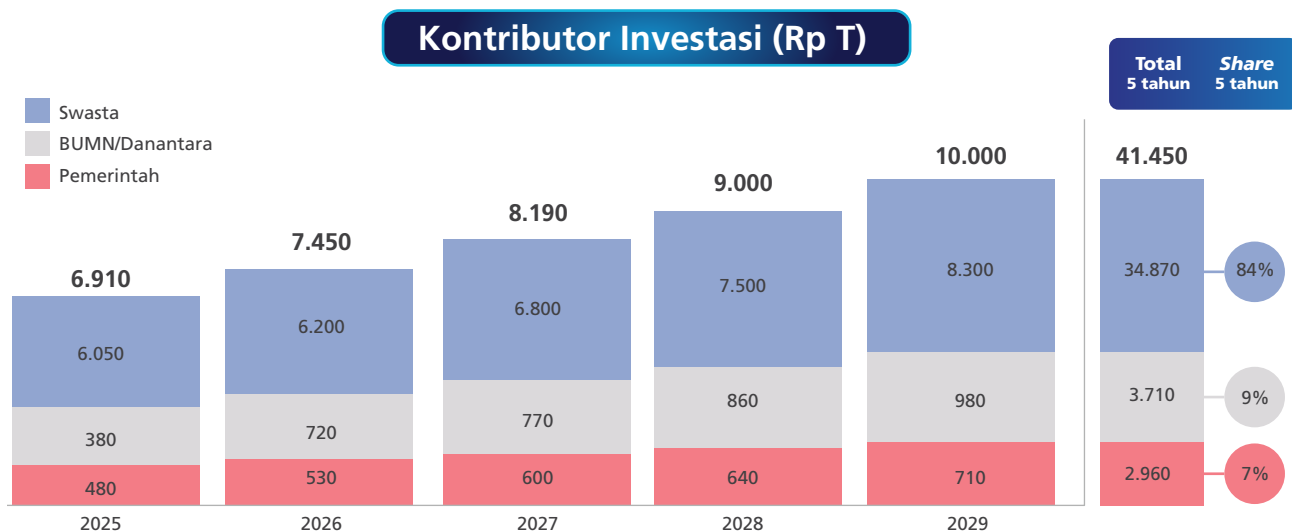
Peran pembiayaan swasta dalam mendukung program prioritas tersebut tecermin secara kuantitatif pada proyeksi kontributor investasi selama periode 2025–2029 (Gambar 7.4.). Total kebutuhan investasi lima tahunan diperkirakan mencapai Rp41.540 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor swasta sebesar Rp34.870 triliun atau sekitar 84% dari total investasi. Sementara itu, peran BUMN dan Danantara diproyeksikan mencapai Rp3.710 triliun atau sekitar 9%, sedangkan kontribusi Pemerintah melalui APBN berada pada kisaran Rp2.960 triliun atau sekitar 7%.

**Untuk meningkatkan partisipasi swasta, Pemerintah mendorong skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan peran lembaga keuangan dan investor jangka panjang.** Peran swasta dibuka untuk membiayai infrastruktur transportasi, energi, dan perumahan. Seiring dengan dikembangkannya berbagai instrumen pembiayaan inovatif dan penguatan peran dana investasi Pemerintah, upaya ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada APBN sekaligus mempercepat penyediaan infrastruktur dan

<sup>19</sup> Realisasi sampai dengan akhir semester I 2025.



Gambar 7.4. Kontributor Investasi 2025–2029



Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

layanan publik. Khusus untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, struktur pembiayaan memadukan Dana Desa sebesar Rp71 triliun per tahun dengan akses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan mikro, program penjaminan kredit, serta berbagai skema dukungan teknis. Dengan kombinasi tersebut, program prioritas kerakyatan diharapkan memiliki basis pembiayaan yang berkelanjutan, tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, serta mampu memobilisasi partisipasi sektor swasta dan komunitas.

### 7.3. Dukungan Bank Indonesia untuk Mendorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Bank Indonesia turut mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan hijau melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong ekonomi inklusif dan hijau melalui pengendalian inflasi dan pemanfaatan *green, sustainable*, atau ESG *bonds*. Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian antara lain melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial. Adapun dukungan kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan untuk mendukung keuangan yang inklusif melalui digitalisasi sistem pembayaran seperti QRIS.

Selain tiga kebijakan utama, Bank Indonesia turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan hijau melalui kebijakan pendukung.

Kebijakan tersebut antara lain: (i) pemberdayaan usaha inklusif guna meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok subsisten secara *end-to-end*, (ii) pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program yang dilakukan secara terintegrasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta mekanisme koordinasi yang efektif, dan (iii) penguatan literasi ekonomi dan keuangan yang inklusif serta keuangan berkelanjutan melalui edukasi terkait keuangan inklusif dan berkelanjutan. Sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau dengan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, namun juga inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia turut mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan hijau melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung



Gubernur Bank Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 06 Agustus 2025 di Jakarta. Kerja sama ini bertujuan mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

### 7.3.1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, khususnya melalui penetapan suku bunga dan pengendalian inflasi. Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, penurunan suku bunga ini dilakukan dengan terus memperhatikan perkembangan inflasi agar tetap berada dalam sasaran sebesar  $2,5 \pm 1\%$ . Inflasi 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy) dengan inflasi inti sebesar 2,38% (yoy). Inflasi inti yang terjaga didukung oleh konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarnya dan *imported inflation* yang rendah. Inflasi yang terjaga mencerminkan kestabilan harga sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Studi literatur menunjukkan bahwa variabel seperti tingkat suku bunga acuan dan inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Hu et al., 2024; Rolim et al., 2024). Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menengah ke bawah menurun lebih tajam dibandingkan kelompok atas, sehingga memperlebar jurang ketimpangan. Sebaliknya,

pengendalian inflasi melalui suku bunga yang tepat dapat membantu mereduksi disparitas ekonomi. Lebih lanjut, studi yang dilakukan terhadap 31.869 rumah tangga di 38 negara menunjukkan bahwa kelompok miskin cenderung menjadikan inflasi sebagai salah satu masalah utama dalam perbaikan kesejahteraan. Bukti empiris menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan dan perubahan upah minimum riil berkorelasi negatif dengan inflasi (Easterly & Fischer, 2001).

**Bank Indonesia berperan aktif menjaga inflasi dalam sasaran dengan bersinergi bersama Pemerintah melalui TPIP/TPID serta GNPIP untuk turut mendorong ekonomi inklusif.** Pratikto, et al. (2015) menunjukkan bahwa inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, Rio dan Armayani (2025) menunjukkan bahwa kenaikan harga produk-produk pokok, termasuk makanan menyebabkan keluarga mengurangi *discretionary spending*, mengalokasikan anggaran, dan menurunkan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam melakukan pengendalian inflasi pangan (*volatile food*), Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui TPIP/TPID serta pelaksanaan GNPIP di



berbagai wilayah dengan dukungan penuh Bank Indonesia. Sejumlah studi menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui TPID, efektif dalam menstabilkan dan menurunkan tingkat inflasi (Dharma, 2015; Purwono et al., 2020).

Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui TPIP/TPID dan GNPIP telah menghasilkan sejumlah kesepakatan rapat koordinasi di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga inflasi pangan (Tabel 7.3.). Selain itu, capaian GNPIP selama tahun 2025 dengan tema penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional sudah jauh di atas target. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga inflasi di seluruh pelosok negeri melalui tujuh program unggulan GNPIP, yakni peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan pangan, kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, pasar murah, digitalisasi data, serta koordinasi dan komunikasi (Tabel 7.4.).

Upaya menjaga stabilitas harga untuk mendukung ekonomi inklusif juga dilakukan melalui program klaster pangan Bank Indonesia. Pada tahun 2025, Bank Indonesia telah melakukan perluasan fasilitasi kepada 125 klaster pangan yang meningkatkan produktivitas lebih dari 10%. Pengembangan klaster pangan ini dilakukan dengan pendampingan dari hulu ke hilir mulai dari pendampingan pemenuhan *standard good agricultural practices*, peningkatan kualitas produk, hingga diversifikasi usaha produk turunan dan perluasan akses informasi (*business matching*, promosi perdagangan, dan *onboarding*).

Kebijakan moneter Bank Indonesia juga turut berperan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui operasi moneter. Dalam menjalankan operasi moneter, Bank Indonesia menerima *green, sustainable*, atau *ESG bonds* sebagai kolateral dalam transaksi repo perbankan. Hal ini turut mendorong minat perbankan terhadap *bonds* tersebut sehingga bank dapat memperoleh likuiditas rupiah dari

Tabel 7.3. Hasil Kesepakatan Rakor TPIP-TPID Wilayah 2025

JAWA (21 Feb '25)	SUMATRA (24 Apr '25)	BALINUSRA (23 Mei '25)	KALIMANTAN (25 Sept '25)	SULAMPUA (27 Oct '25)
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan produktivitas di daerah sentra &amp; defisit untuk meningkatkan kemandirian pangan</li> <li>• Penguatan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)</li> <li>• Penyempurnaan pola tanam untuk menjaga pasokan agar merata</li> <li>• Penguatan pasokan MBG melalui penguatan peran BUMD/BUMDes</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi di daerah sentra &amp; defisit untuk meningkatkan kemandirian pangan</li> <li>• Penyempurnaan pola tanam untuk menjaga pasokan agar merata</li> <li>• Penguatan hilirisasi pangan terutama aneka cabai</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan partisipasi petani generasi muda</li> <li>• Penguatan produktivitas di daerah sentra &amp; defisit</li> <li>• Penguatan <i>linkage</i> UMKM pangan dengan perhotelan dan Perumda Pangan</li> <li>• Penguatan konektivitas dan infrastruktur pelabuhan</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ketahanan pangan, a.l melalui gudang dan <i>cold-storage</i></li> <li>• Penguatan produktivitas di daerah sentra &amp; defisit</li> <li>• Percepatan implementasi program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimalisasi Lahan (Oplah)</li> <li>• Penguatan KAD untuk memenuhi pasokan (termasuk IKN) termasuk bersinergi dengan BUMN logistik</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan stabilisasi harga pangan dengan lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat lokasi</li> <li>• Menjaga ketersediaan pasokan hortikultura dan perikanan setiap saat</li> <li>• Mempermudah akses logistik dan pembiayaan yang lebih efisien</li> </ul>

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 7.4. Hasil Capaian GNPIP 2025

No.	Program Unggulan GNPIP	Target	Pencapaian	Satuan	% Nas.	Sumatra	Jawa	Balinsura	Kalimantan	Sulampua
1	Peningkatan Produktivitas									
	a. Optimalisasi GAP	125	678	Program	542,40%	600,00%	529,27%	362,50%	437,50%	608,00%
	b. Kelembagaan klaster pangan	75	300	Program	400,00%	221,05%	317,86%	240,00%	1.140,00%	330,77%
2	Penguatan Ketahanan Pangan									
	a. Replikasi <i>Best Practices</i>	127	222	Program	174,80%	177,14%	182,50%	137,50%	193,33%	162,07%
	b. Hilirisasi Pangan	115	178	Program	154,78%	105,88%	207,89%	100,00%	150,00%	159,09%
	c. Fasilitasi Kemitraan <i>offtaker</i>	46	126	Program	273,91%	238,46%	307,14%	400,00%	333,33%	200,00%
3	Kerja Sama Antar Daerah	132	378	MoU	286,36%	331,58%	339,53%	211,11%	188,24%	220,00%
4	Fasilitasi Distribusi Pangan	226	1.690	Program	747,79%	863,39%	1.084,62%	600,00%	244,83%	368,18%
5	Pasar Murah	13.800	19.993	Pelaksanaan	144,88%	148,60%	155,42%	119,13%	137,50%	133,20%
6	Digitalisasi Data	66	108	Program	163,64%	130,00%	181,82%	320,00%	162,50%	118,18%
7	Koordinasi & Komunikasi									
	a. Koordinasi Kelembagaan	626	980	Kegiatan	156,55%	135,23%	180,58%	123,68%	126,83%	176,61%
	b. <i>Capacity Building</i> TPID	136	330	Program	242,65%	294,44%	259,57%	144,44%	212,50%	196,43%
	c. Pengendalian Ekspektasi	472	1.188	Program	251,69%	209,92%	192,81%	322,22%	259,38%	376,29%
	d. Diversifikasi & Olahan Pangan	175	282	Program	161,14%	119,15%	222,41%	150,00%	150,00%	128,95%
	e. Pemanfaatan insentif KLM	73	144	Program	197,26%	104,76%	254,17%	200,00%	155,56%	264,29%

Sumber: PowerApps GNPIP, posisi 31 Desember 2025

bank sentral untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga turut menyelaraskan portofolio yang dimiliki, terutama surat utang berkelanjutan, yaitu instrumen utang yang diterbitkan untuk membiayai kegiatan atau proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan/atau sosial dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Bank Indonesia juga mengalokasikan sebagian cadangan devisa ke dalam aset dalam bentuk *green, social, dan sustainability bonds* sejalan dengan kontribusi pada pasar keuangan yang mendukung *environment, social, and governance* (ESG).

### 7.3.2. Kebijakan Makroprudensial

**Asta Cita dan Program Prioritas Pemerintah akan melibatkan sektor-sektor prioritas yang perlu didorong pertumbuhan pembiayaannya.** Beberapa sektor prioritas yang terlibat dalam

program strategis nasional antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa sosial (Gambar 7.5.). Keterlibatan sektor pertanian terutama bersumber dari program ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), dan ketahanan energi yang akan memanfaatkan minyak sawit mentah/*crude palm oil* (CPO) sebagai bahan baku biodiesel. Industri pengolahan terlibat dalam program MBG, program ketahanan energi, hilirisasi pangan dan sumber daya alam, program kesehatan, serta program pendidikan terutama revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Beragamnya keterlibatan industri pengolahan dalam program prioritas nasional setidaknya akan melibatkan industri makanan dan minuman, industri kimia, dan industri furnitur. Sementara keterlibatan sektor konstruksi terutama bersumber dari program pembangunan perumahan, serta program revitalisasi sekolah dan rumah sakit.



Gambar 7.5. Potensi Pembiayaan Sektorial dari Program Prioritas Pemerintah



Sumber: Bank Indonesia

Keterlibatan sektor perdagangan bersumber dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara keterlibatan sektor jasa sosial, khususnya jasa kesehatan, terutama akan bersumber dari program peningkatan pelayanan kesehatan. Keterlibatan sektor-sektor prioritas ini perlu mendapatkan dukungan dalam hal pembiayaan melalui kebijakan makroprudensial. Pada akhir 2025, pertumbuhan kredit pada sektor pertanian, konstruksi, dan jasa sosial masih meningkat dan terjaga, namun pertumbuhan kredit pada sektor industri pengolahan dan perdagangan perlu untuk lebih didorong lagi.

**Program prioritas nasional juga berpotensi melibatkan sektor UMKM dan berkelanjutan/hijau.** Program prioritas Pemerintah, khususnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), dan Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka peluang bagi partisipasi UMKM dalam penguatan ekonomi lokal dan rantai pasok program Pemerintah. Partisipasi UMKM dalam program KDMP/KKMP memberikan dampak positif berupa penguatan kelembagaan melalui pembentukan klaster usaha terorganisir yang mendukung pengembangan kapasitas usaha. UMKM juga memperoleh akses bahan baku dan layanan dengan harga lebih terjangkau, termasuk pupuk, gas, dan sembako

subsidi. Selain itu, program ini membuka peluang tambahan pendapatan melalui berbagai layanan usaha serta memperluas akses pasar melalui peran KDMP sebagai agregator produk UMKM, didukung pendampingan teknis dari dinas koperasi setempat. Partisipasi UMKM sebagai pemasok dalam program MBG juga memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan pendapatan dari pemesanan SPPG yang terjadwal dan kepastian harga yang lebih stabil (Gambar 7.6.). Program MBG juga mendorong UMKM mendiversifikasi produk berdasarkan permintaan bahan baku dari SPPG. Selain itu, program prioritas Pemerintah juga berpotensi melibatkan sektor hijau yang bersumber dari program perumahan yang dapat membangun rumah berbasis hijau, seperti memanfaatkan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Keterlibatan sektor UMKM dan berkelanjutan juga perlu mendapatkan dukungan dalam hal pembiayaan, mengingat pembiayaan pada sektor-sektor ini sedang dalam tren melambat pada akhir 2025.

**Keterlibatan sektor-sektor prioritas pada program prioritas nasional membuka peluang peningkatan permintaan kredit/pembiayaan.** Kredit masih tumbuh kuat sebesar 9,69% pada Desember 2025, namun sedikit menurun dibandingkan dengan Desember 2024 sebesar

Gambar 7.6. Keterlibatan UMKM dalam Program MBG

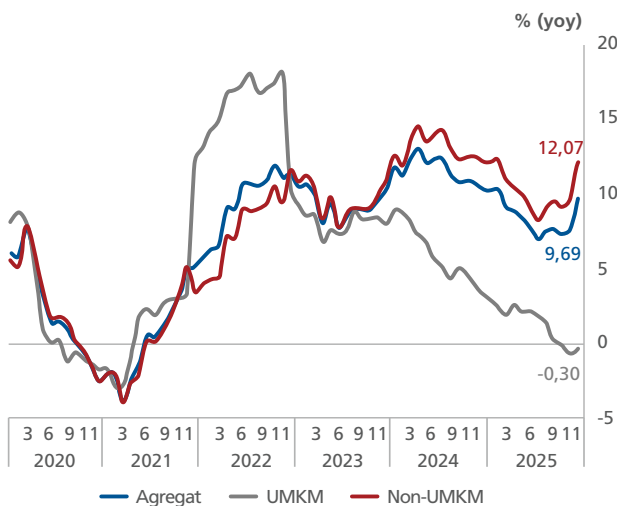


Sumber: Bank Indonesia

10,39%. Salah satu tantangan berasal dari sektor UMKM yang pertumbuhannya semakin terkontraksi sebesar 0,30% pada Desember 2025 (Grafik 7.1.). Perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke UMKM, ditunjukkan oleh indeks *lending requirement* UMKM yang semakin meningkat (Grafik 7.2.).<sup>20</sup> Risiko kredit UMKM meningkat seiring kinerja yang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah.

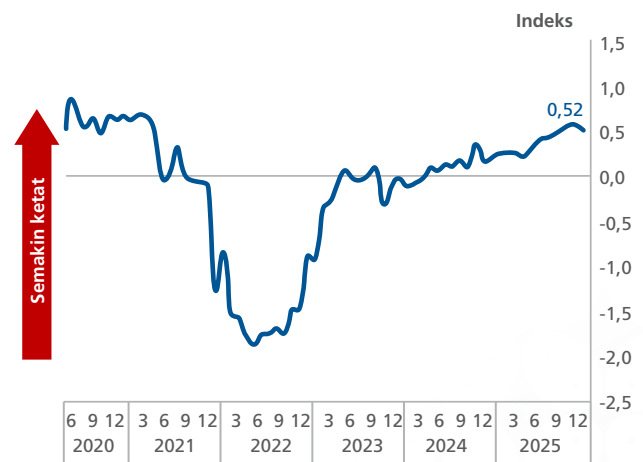
Pada Desember 2025, NPL UMKM tercatat sebesar 4,33% (bruto), meningkat dibandingkan dengan Desember 2024 sebesar 3,76% (bruto). Adanya potensi keterlibatan sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, pada program strategis Pemerintah serta dukungan kebijakan makroprudensial diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan.

Grafik 7.1. Pertumbuhan Kredit, termasuk UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.2. Indeks *Lending Requirement* Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

<sup>20</sup> Indeks *Lending Requirement* (ILR) adalah indeks yang menggambarkan seberapa ketat atau longgar persyaratan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Indeks ini juga mencerminkan sikap bank terhadap risiko kredit dan kondisi penawaran kredit (*credit supply*).



Grebeg UMKM X DJAMUAN Istimewa DIY 2025 diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk mendorong penjualan UMKM dan memperluas akses ekonomi digital.

Bank Indonesia mendukung keterlibatan sektor prioritas serta UMKM dan sektor hijau dalam program prioritas Pemerintah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan. Sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, telah dilakukan pelonggaran kebijakan insentif KLM sejak 2022. Bank Indonesia secara berkala melakukan evaluasi kebijakan insentif KLM untuk memperkuat efektivitasnya dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit, baik dari cakupan sektor maupun besaran insentifnya. Bank Indonesia kembali melakukan penguatan kebijakan insentif KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang terdiri dari *lending channel* dan *interest rate channel* dengan besaran insentif paling tinggi sebesar 5,5%, yang telah dijelaskan pada Bab V. Terkait dengan dukungan kepada program prioritas Pemerintah, penguatan KLM telah mendukung sektor-sektor prioritas yang terlibat, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa sosial. Khususnya terkait hilirisasi, insentif diberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada sektor hilirisasi pangan dan hilirisasi lanjutan berbasis sumber daya alam. Selain itu, sebagai bentuk dukungan kepada ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kebijakan insentif KLM juga memberikan insentif kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Dukungan kebijakan ini

diharapkan dapat mendorong pembiayaan di sektor-sektor prioritas yang terlibat dalam program prioritas nasional, sehingga dapat mempercepat pencapaian dari tujuan program prioritas.

Bank Indonesia juga mendukung pembiayaan ke sektor inklusi melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), serta pembiayaan kepemilikan rumah melalui kebijakan LTV/FTV. Bank Indonesia juga telah mengimplementasikan kebijakan rasio pembiayaan inklusi makroprudensial (RPIM) sejak 2021 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada UMKM, Korporasi UMKM dengan kriteria tertentu, dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR), sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi serta memperkuat inklusi keuangan. Perbankan diharapkan melakukan diversifikasi portolio pembiayaannya pada sektor inklusi sesuai dengan komitmen masing-masing bank. Realisasi RPIM industri perbankan telah mencapai 33,57% pada 2024, meningkat dibandingkan dengan 33,55% pada 2023. Sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial yang akomodatif, Bank Indonesia masih menerapkan rasio *Loan to Value* atau *Financing to Value* (LTV/FTV) maksimum sebesar 100%, termasuk untuk kredit berwawasan lingkungan. Kebijakan ini dapat mendukung program pembangunan perumahan rakyat, melalui peningkatan pembiayaan kepemilikan rumah.

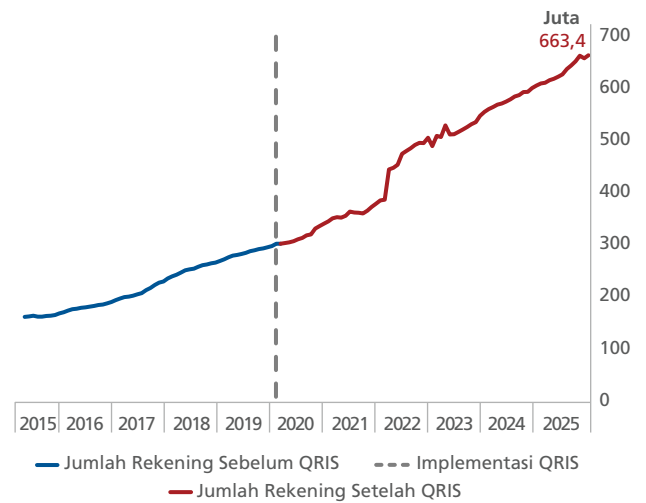
### 7.3.3. Kebijakan Sistem Pembayaran

Digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi digital nasional yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas inklusi keuangan. Dalam pengembangan ekosistem sistem pembayaran, konsepsi *two-sided market* menjadi fondasi utama, dimana keberhasilan adopsi pembayaran ditentukan oleh keseimbangan sisi pengguna dan sisi *merchant*. Dalam konsepsi ini, peningkatan nilai bagi pengguna akan meningkatkan akseptasi *merchant*, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan intensitas transaksi di sisi pengguna. Kerangka ini menjadi kunci dalam suksesi perluasan akseptasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

**Transformasi perilaku pembayaran masyarakat menjadi titik awal percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.** Pada fase awal implementasi, perkembangan QRIS bersifat *demand-driven*, tecermin dari pertumbuhan jumlah pengguna yang meningkat dibandingkan pertumbuhan jumlah *merchant*. Berbagai inisiatif Bank Indonesia melalui sosialisasi dan edukasi sistem pembayaran, serta kampanye nasional bersinergi dengan lintas kementerian/lembaga seperti QRIS Jelajah Indonesia, telah berhasil meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Fitur yang ditawarkan oleh QRIS sejalan dengan kebutuhan transaksi ritel yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, sehingga mengubah preferensi masyarakat terhadap pembayaran nontunai. Hingga triwulan IV 2025, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai sekitar 59,53 juta pengguna, mencerminkan meluasnya adopsi instrumen pembayaran digital di sisi konsumen.

**Perkembangan jumlah pengguna QRIS tidak hanya merefleksikan adopsi instrumen pembayaran nontunai, tetapi juga menunjukkan perubahan struktural yang lebih luas.** Akselerasi pertumbuhan jumlah rekening perbankan pasca-implementasi QRIS meningkat signifikan dibandingkan periode pra-QRIS (Grafik 7.3.). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa QRIS

Grafik 7.3. Perkembangan Jumlah Rekening Tabungan Pasca-Implementasi QRIS



Sumber: Bank Indonesia

juga menjadi *entry point* dalam memperkuat keterhubungan masyarakat dengan sistem keuangan formal sebagai salah satu prasyarat inklusi keuangan.

**Sejalan dengan kondisi tersebut, penguatan dari sisi penawaran (*supply side*) menjadi faktor kunci dalam mendorong pemanfaatan QRIS di sisi *merchant*.** Dalam struktur perekonomian Indonesia yang didominasi oleh UMKM dan pelaku usaha mikro, keputusan adopsi pembayaran digital sangat dipengaruhi oleh pertimbangan biaya. Margin usaha yang terbatas dan sensitivitas tinggi terhadap tambahan biaya operasional, menjadikan biaya layanan pembayaran digital menjadi salah satu hambatan utama adopsi QRIS, khususnya pada sektor mikro dan informal. Oleh karena itu, pengembangan di sisi penawaran perlu didukung oleh penciptaan insentif ekonomi yang dapat mendorong adopsi QRIS secara berkelanjutan.

**Dalam merespon tantangan tersebut, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan di sisi penawaran untuk menurunkan hambatan biaya dan meningkatkan insentif ekonomi bagi *merchant*.** Salah satu kebijakan utama yang ditempuh adalah pengaturan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS melalui penerapan MDR 0% untuk kategori *merchant* usaha mikro dengan batas transaksi maksimal Rp500 ribu pada 1 Desember 2024. Kebijakan



ini menjadi katalis penting dalam mendorong perluasan akseptasi QRIS, khususnya pada segmen UMKM. Setelah implementasi MDR 0%, jumlah *merchant* QRIS meningkat secara drastis, dengan dominasi *merchant* UMKM yang mencapai lebih dari 90% dari total *merchant* QRIS. Hingga triwulan IV 2025, jumlah *merchant* QRIS tercatat mencapai sekitar 42,75 juta *merchant*, mencerminkan transformasi sisi penawaran dan adopsi pembayaran digital di sisi *merchant* yang semakin inklusif.

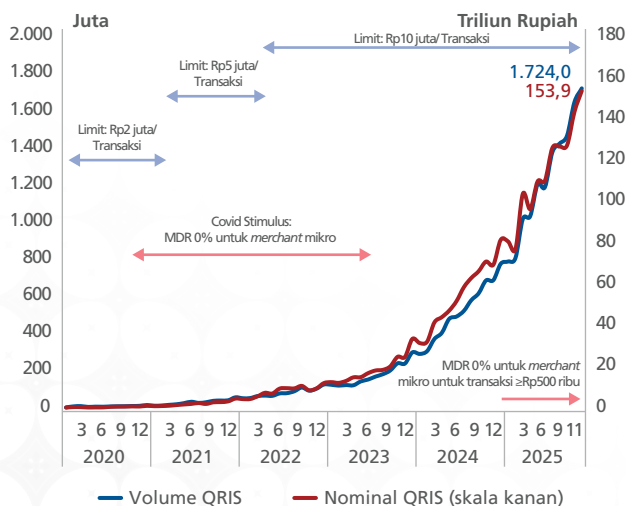
Bank Indonesia juga memperkuat sisi penawaran melalui penyesuaian batas nilai transaksi (limit) QRIS secara bertahap dan terukur. Pada tahap awal implementasi, batas transaksi QRIS ditetapkan relatif rendah untuk menjaga manajemen risiko dan memastikan kesiapan infrastruktur, dengan limit sebesar Rp2 juta per transaksi (Grafik 7.4.). Seiring dengan meningkatnya adopsi, stabilitas sistem, serta kapasitas penyelenggara dan *merchant*, Bank Indonesia secara gradual menaikkan batas transaksi QRIS menjadi Rp5 juta dan selanjutnya hingga Rp10 juta per transaksi. Penyesuaian limit ini memperluas cakupan penggunaan QRIS, tidak hanya untuk transaksi ritel bernilai kecil, tetapi juga untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar. Hal ini meningkatkan relevansi QRIS bagi *merchant* skala menengah dan memperluas *use case* pembayaran digital di berbagai sektor ekonomi. Kebijakan ini berperan penting dalam

meningkatkan intensitas dan nilai transaksi, sekaligus mendorong perkembangan transaksi QRIS secara berkelanjutan dan transformasi sisi penawaran menuju ekosistem pembayaran yang lebih matang.

Penguatan sisi penawaran juga dilakukan melalui penetapan QRIS sebagai standar nasional melalui regulasi dan inovasi sistem pembayaran. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran telah menetapkan QRIS sebagai standar nasional QR code pembayaran untuk memastikan interoperabilitas antarpelenggara dan memperluas kemudahan penggunaan QRIS di seluruh Indonesia. QRIS, sebagai satu bahasa, mendorong kemudahan interkoneksi serta telah mendorong peningkatan transaksi *off us* secara signifikan. Pada tahun 2025, pangsa transaksi QRIS *off us*<sup>21</sup> telah mencapai 90% dari total transaksi QRIS, meningkat dari 42% di tahun 2023. Pergeseran ini mengindikasikan perubahan struktural dalam ekosistem pembayaran, dimana hambatan antarpelenggara semakin berkurang serta memperkuat efisiensi dan integrasi ekosistem pembayaran ritel nasional. Dengan standar tersebut, dapat dikembangkan inovasi lanjutan QRIS sekaligus memperluas fungsi dan *use case* QRIS, seperti QRIS dengan *Source of Fund Paylater* dan QRIS TUNTAS (tarik tunai, setor tunai, dan *transfer*) serta pengembangan QRIS Antarnegara. Saat ini, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran domestik, tetapi juga sebagai bagian dari integrasi sistem pembayaran regional dan global (Gambar 7.7.). Inisiatif ini memperkuat daya tarik QRIS di sisi *merchant* dan pengguna, sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi lintas wilayah dan lintas negara.

Lebih lanjut, transformasi sisi penawaran melalui perluasan *merchant* QRIS mendorong perubahan yang lebih struktural, yaitu transformasi kegiatan usaha dari sektor informal menuju sektor formal. Digitalisasi transaksi melalui QRIS

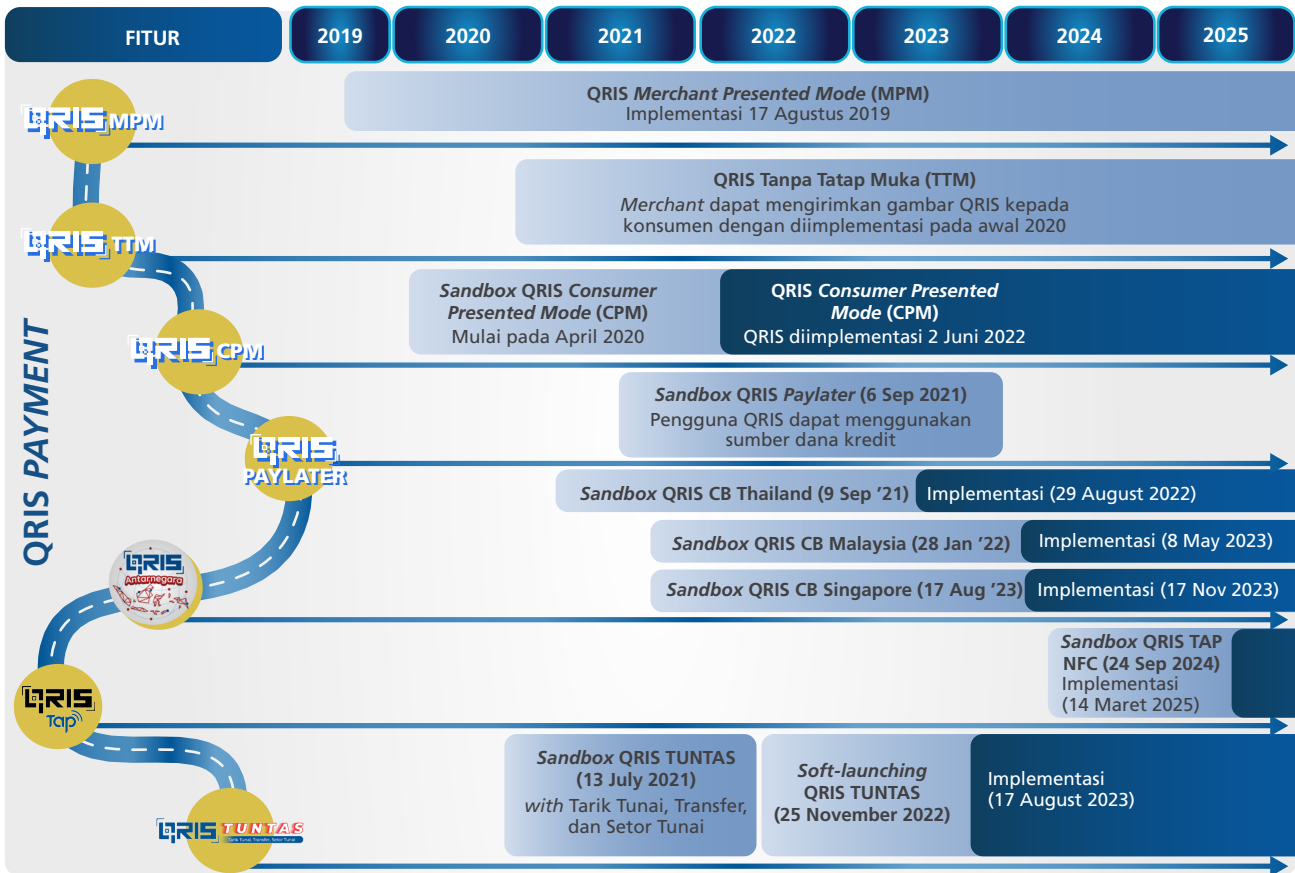
Grafik 7.4. Timeline Kebijakan Limit dan MDR QRIS



Sumber: Bank Indonesia

21 *Off us* merupakan transaksi yang dilakukan oleh penerbit dan *acquirer* yang berbeda. Sebaliknya, *on-us* merupakan transaksi yang dilakukan oleh penerbit dan *acquirer* yang sama.

Gambar 7.7. Perkembangan Inovasi QRIS



Sumber: Bank Indonesia

memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih aman, transparan, dan terdokumentasi secara elektronik. Rekam jejak transaksi ini menjadi fondasi penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitas usaha dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan biaya transaksi yang lebih murah dan proses pembayaran yang lebih efisien, *merchant* terdorong untuk meningkatkan intensitas penggunaan QRIS. Sementara itu, konsumen memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Peningkatan jumlah *merchant* dengan transaksi reguler dan berulang dapat menjadi proksi awal proses formalisasi usaha.

Pada akhirnya, keseimbangan antara penguatan sisi permintaan dan sisi penawaran menjadi kunci keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran. Peningkatan preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital perlu diimbangi dengan ketersediaan *merchant*, kebijakan biaya

yang akomodatif, serta penguatan regulasi dan inovasi sistem pembayaran. Sinergi antara kedua sisi ini mendorong peningkatan volume dan nilai transaksi QRIS secara berkelanjutan. Pada akhirnya, peningkatan transaksi QRIS dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efisiensi ekonomi, mendorong formalisasi usaha, memperkuat inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 7.3.4. Kebijakan Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

Pengembangan Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau dimaksudkan untuk mendukung kebijakan utama Bank Indonesia melalui peningkatan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: (i) ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya



saing, (ii) pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan yang optimal, serta (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas.

**Strategi ini berfokus pada pemberdayaan usaha inklusif guna meningkatkan daya saing UMKM dan kelompok subsisten secara *end-to-end* dari hulu ke hilir, perluasan akses pasar dan pengembangan infrastruktur, serta digitalisasi.** Pemberdayaan usaha inklusif dilakukan melalui korporatisasi untuk memperkuat kelembagaan usaha dan penguatan kapasitas UMKM baik dari sisi produksi, SDM maupun pemasaran, melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif. Sementara itu, perluasan akses pasar diwujudkan melalui integrasi rantai pasok, baik di tingkat nasional maupun global antara lain melalui *business matching* antara UMKM dengan pelaku usaha besar, *off-taker*, dan *buyer* internasional. Selain itu, UMKM didorong untuk melakukan *onboarding* ke berbagai *platform* digital dan *e-commerce* guna memperluas jangkauan pasar. Upaya promosi perdagangan juga dilakukan secara aktif, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

**Pengembangan infrastruktur dan digitalisasi diarahkan untuk mendukung seluruh rangkaian program ekonomi-keuangan inklusif. Fokus**

pengembangan meliputi penyediaan *tools* dan basis data UMKM yang terintegrasi, pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan, pelaksanaan *pilot project* sebagai percontohan, serta penyusunan pedoman pengembangan UMKM yang dapat direplikasi. Dengan dukungan infrastruktur dan digitalisasi yang memadai, program ini diharapkan mampu berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

**Implementasi pemberdayaan usaha inklusif dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, salah satunya ECO-RISE<sup>22</sup> dengan objek program yang disesuaikan dengan segmen UMKM di antaranya UMKM pengolahan (manufaktur), klaster pangan, UMKM potensi ekspor, UMKM *go digital*, dan UMKM hijau.** Pada UMKM pengolahan, implementasi program dilakukan melalui model bisnis kemitraan rantai pasok UMKM. Fokus program pemberdayaan yaitu pada UMKM *aggregator* yang berfungsi sebagai pusat pengolahan bahan baku, tahap *finishing* dan *Quality Control* (QC) dan pengemasan yang memiliki kontrak kemitraan rantai pasok dengan industri (Gambar 7.8.). Fokus pengembangan ini sejalan dengan program hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi.

Gambar 7.8. Pola Kemitraan Rantai Pasok UMKM



Sumber: Bank Indonesia

22 ECO Rise: Empowering Community & MSMEs toward Resilient, Inclusive, and Sustainable Economy.

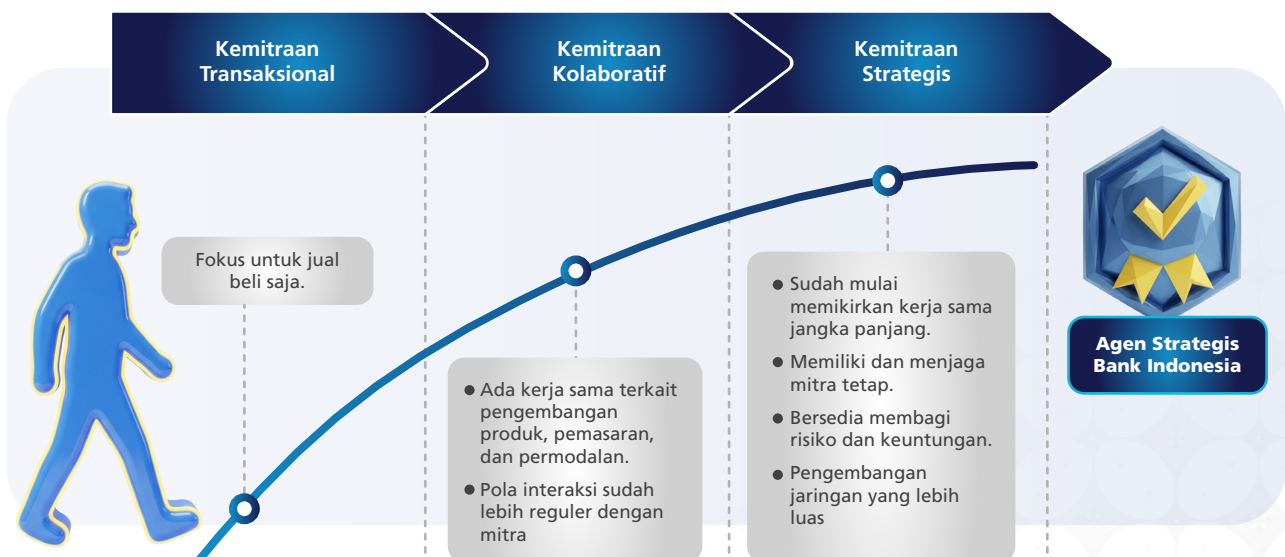
Program pemberdayaan dikelompokkan berdasarkan pola kemitraan rantai pasok, yaitu kemitraan transaksional (jangka pendek), kolaboratif (koordinatif dan berbagi risiko), serta strategis (jangka panjang berbasis kepercayaan dan kontrak). Pada kemitraan transaksional, UMKM masih berada pada tahap awal dengan keterbatasan legalitas dan kapasitas usaha (Gambar 7.9.). Pemberdayaan difokuskan pada penguatan fondasi dasar melalui fasilitasi perizinan usaha, pelatihan manajemen keuangan sederhana, literasi digital, promosi awal, akses pembiayaan mikro, serta penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) produksi dasar, dengan tujuan mendorong UMKM masuk ke ekosistem formal. Pada kemitraan kolaboratif, UMKM telah memiliki legalitas dan akses pasar yang lebih baik. Dukungan diarahkan pada penguatan kelembagaan kolektif (koperasi/asosiasi), fasilitasi sertifikasi nasional, peningkatan kapasitas manajemen dan kepemimpinan, pengembangan pembiayaan berbasis kluster, digitalisasi pembayaran, serta perluasan pemasaran melalui *business matching* dan pameran nasional. Pada kemitraan strategis, UMKM siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Pembina, termasuk Bank Indonesia, berperan sebagai katalis melalui pendampingan sertifikasi ekspor, advokasi kebijakan, pengembangan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan melalui koperasi formal

atau *holding* UMKM, perluasan akses pembiayaan ke investor, penguatan rantai pasok, serta promosi di pasar global. Pada triwulan III 2025, terdapat 1.956 UMKM pada industri pengolahan yang menyerap 26.192 tenaga kerja dengan mayoritas komoditas makanan minuman olahan sebesar 49,03% dan Tekstil & Produk Tekstil (TPT) sebesar 27,10% (Gambar 7.10.).

Pada kluster pangan, pemberdayaan dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi kegiatan budidaya, pengolahan pascapanen, serta pengembangan kemitraan dengan *offtaker* dan industri. Pengembangan kluster pangan pada sisi hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan dan replikasi praktik terbaik (*best practice*) pada seluruh tahapan budidaya, yang mencakup pemupukan, pembenihan, pengaturan pola tanam, sistem irigasi, serta pengendalian Hama Pengganggu Tanaman (HPT). *Best practice* tersebut diperoleh dari hasil kajian dan pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*).

Proyek percontohan yang berhasil selanjutnya direplikasi oleh kluster pangan binaan Bank Indonesia dengan target peningkatan produktivitas lebih dari 10%, sejalan dengan salah satu program Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Pada triwulan III 2025, terdapat 290 kluster binaan Bank Indonesia, terdiri dari

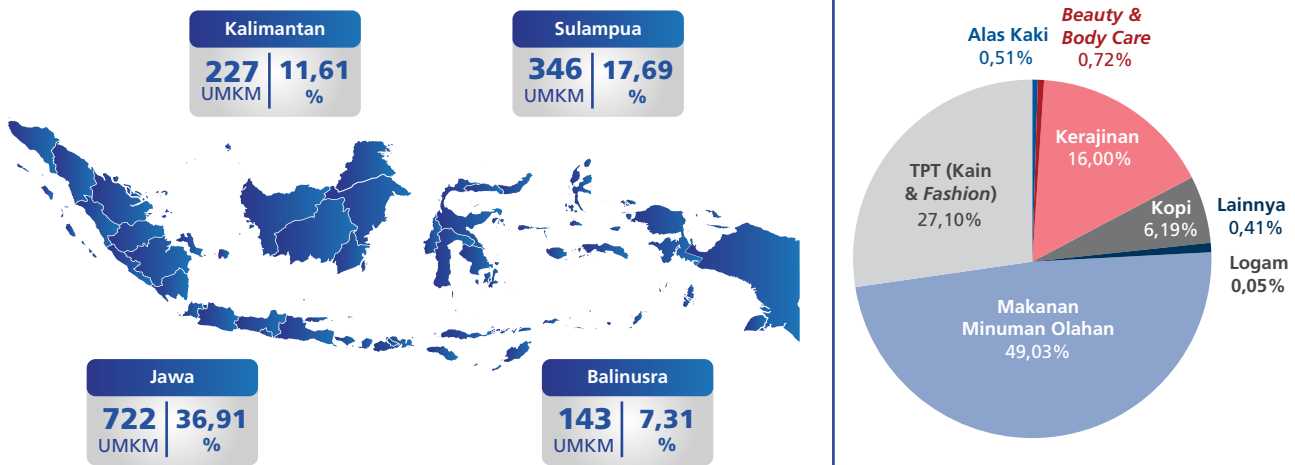
Gambar 7.9. Journey UMKM pada Pola Kemitraan



Sumber: Bank Indonesia



Gambar 7.10. Sebaran dan Komposisi UMKM Pengolahan Binaan Bank Indonesia

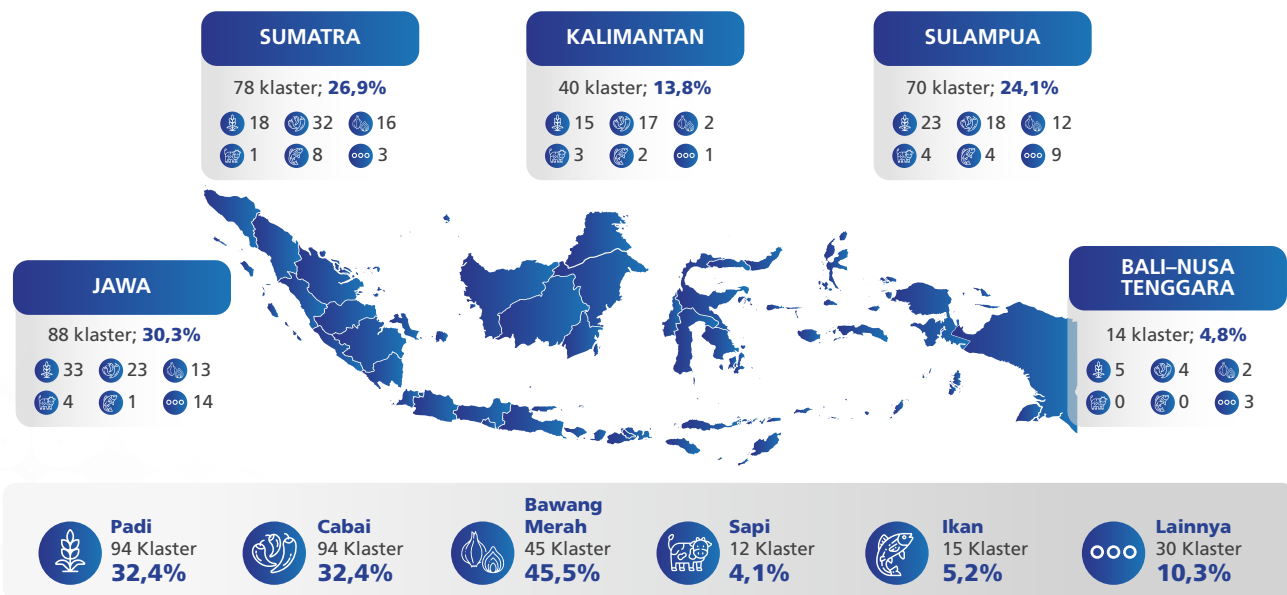


Sumber: Bank Indonesia

klaster padi, cabai, bawang merah, sapi, ikan, dan klaster lainnya (Gambar 7.11.). Pada sisi hilir, pemberdayaan difokuskan pada penanganan pascapanen untuk mengurangi *food loss* hingga pengembangan produk olahan untuk peningkatan nilai tambah produk dan kemitraan dengan *offtaker* dan industri (hilirisasi) mengacu pada model bisnis hilirisasi klaster pangan (Gambar 7.12.).

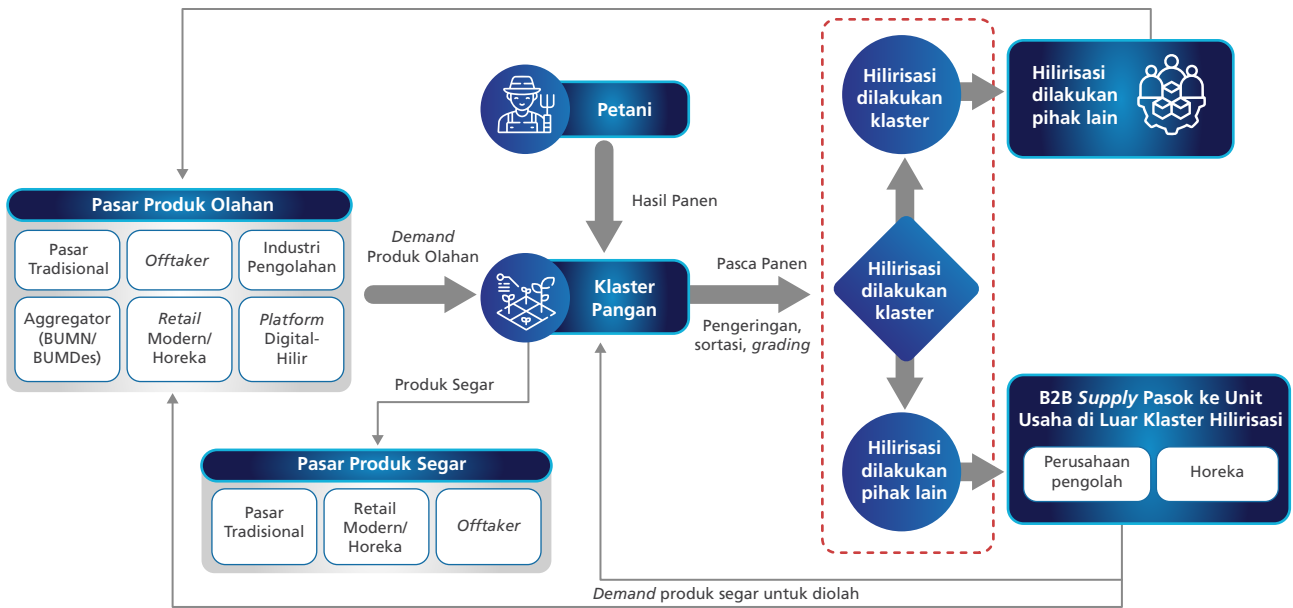
Pemberdayaan juga dilakukan untuk UMKM potensi ekspor melalui penerapan dua strategi utama, yaitu: (i) *pull strategy (market driven)* untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan (ii) *push strategy* melalui fasilitasi penguatan kapasitas UMKM. Peran Bank Indonesia dalam implementasi *pull strategy* antara lain berupa fasilitasi kurasi dan promosi perdagangan yang *selected* dan *targeted, business matching*,

Gambar 7.11. Sebaran Klaster Pangan Binaan Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 7.12. Model Bisnis Hilirisasi Kluster Pangan



Sumber: Bank Indonesia

dan pengembangan *trading house*. Strategi tersebut perlu didukung dengan penguatan kapasitas UMKM melalui *push strategy* antara lain melalui penyusunan modul ekspor, penajaman *e-catalogue*, *capacity building*, dan pendampingan. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun Pedoman UMKM *Go Global* yang dapat digunakan sebagai *guidance* bagi pembina dan fasilitator UMKM, serta UMKM dalam mempersiapkan diri untuk memasuki

pasar global dengan fokus penguatan pada aspek-aspek 5K (kualitas, kuantitas, kapasitas, kontinuitas, dan kemasan), dan 2S (standardisasi dan sertifikasi)-(Gambar 7.13.). Untuk memudahkan dalam penggunaannya, pedoman ini terdiri dari 9 langkah yang disusun secara terstruktur mulai dari program pendukung dan pendampingan ekspor, penyusunan legalitas, kesiapan produk ekspor, sampai dengan evaluasi kesiapan dan menyusun perencanaan *go global*.

Gambar 7.13. Pedoman UMKM *Go Global*



Sumber: Bank Indonesia



Upaya mendorong UMKM *Go Digital* dilakukan melalui program DIGDAYA UMKM (Digitalisasi untuk Peningkatan Daya Saing UMKM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam pemasaran daring dan digitalisasi usaha melalui pemberian edukasi, memfasilitasi UMKM agar mampu melakukan proses *onboarding* secara optimal ke berbagai saluran pemasaran digital sesuai dengan kebutuhan usahanya, serta mendorong UMKM untuk naik kelas melalui penguatan kapasitas pemasaran digital yang berkelanjutan. Program DIGDAYA UMKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang meliputi proses kurasi dan perencanaan program, edukasi, pendampingan, serta *monitoring* dan evaluasi.

UMKM juga diarahkan agar menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan melalui program UMKM Hijau. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat mengelaborasi konsep bisnis hijau dengan mengembangkan *green process* dan *green output* dengan berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan rantai nilai ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. UMKM hijau diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu *Eco-Adopter*, *Eco-Entrepreneur*, dan *Eco-Innovator* (Gambar 7.14.).

Berbagai strategi dirancang untuk mendorong pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program yang dilakukan secara terintegrasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Pendekatan ini bertujuan agar proses pembiayaan dapat menjangkau berbagai

segmen masyarakat dan pelaku usaha secara optimal. Dalam konteks peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, Bank Indonesia melaksanakan fasilitasi secara *end-to-end*, meliputi pencatatan keuangan usaha secara digital melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Keuangan (SIAPIK), pelaksanaan *business matching* pembiayaan, serta penyediaan *database* profil UMKM potensial dibiayai (BISAID). Pencatatan digital melalui SIAPIK yang menerapkan prinsip Standar, Mudah, Aman, Sederhana, dan Handal memungkinkan UMKM memiliki laporan keuangan yang terstandar, sehingga lembaga keuangan dapat lebih mudah menganalisis potensi kelayakan kredit, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembiayaan. Selain itu, program *business matching* pembiayaan UMKM dirancang untuk mengurangi ketimpangan informasi antara UMKM dan lembaga keuangan serta memfasilitasi pertemuan langsung melalui sesi *one-on-one*. Melalui mekanisme ini, UMKM diharapkan lebih memahami prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan, sekaligus meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan yang inklusif. Lebih lanjut, pelaksanaan *business matching* juga dapat dilakukan secara mandiri oleh lembaga keuangan melalui *platform* BISAID (Gambar 7.15.), yang memungkinkan akses dan analisis data profil UMKM potensial kapan saja secara fleksibel. Dengan kombinasi pendekatan digital dan interaksi langsung, strategi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Gambar 7.14. Tahapan UMKM Hijau



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 7.15. BISAID – Database Profil UMKM Potensial Dibiayai

The screenshot shows the 'Request Data UMKM' page in the BISAID system. The page has a blue header with the BISAID logo and a notification badge showing '61'. The main content area contains a search form with the following fields:

- Provinsi: -- Pilih Semua Provinsi --
- Kabupaten / Kota: [Dropdown]
- Sektor Usaha: -- Pilih Semua Sektor Usaha --
- Loan Size: -- Pilih Semua Loan Size --

Below the form are buttons for 'Cari' and 'Add To Cart'. A search bar is located on the right side of the form. At the bottom, there is a table with the following columns:

No ↑↓	Pilih	Nama Perusahaan / Nama Pengusaha ↑↓	Sektor Usaha ↑↓	Loan S

Sumber : Bank Indonesia

**Upaya pengembangan pembiayaan hijau juga terus ditingkatkan.** Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah perluasan pemanfaatan Kalkulator Hijau. Kalkulator Hijau merupakan alat berbasis *mobile* yang dirancang untuk memudahkan perhitungan emisi karbon dan dapat diakses secara gratis oleh berbagai pihak. Kehadiran alat ini diharapkan memungkinkan lebih banyak pihak, termasuk UMKM, untuk secara langsung menghitung emisi yang dihasilkan. Selain itu, telah dilakukan pengembangan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia (IEHI) sebagai instrumen untuk mengukur dan memantau kemajuan implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Indeks ini dikembangkan dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan konteks nasional, sehingga mampu mencerminkan dinamika transisi menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif. Melalui IEHI, strategi lanjutan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dapat dipetakan secara lebih sistematis.

**Literasi ekonomi dan keuangan yang inklusif serta berkelanjutan dilakukan melalui edukasi yang terstruktur, masif, dan berorientasi pada sasaran.** Implementasinya dilakukan melalui edukasi terkait keuangan inklusif dan berkelanjutan, edukasi layanan keuangan, serta pengembangan strategi literasi keuangan

yang mendukung kedua aspek tersebut melalui Program Kompetensi Inti Literasi dan Inklusi Keuangan (KLIK). Penguatan literasi ekonomi-keuangan inklusif dalam program tersebut mengacu pada modul *Digital Financial Services* berbasis *core competencies* yang disusun melalui kajian yang komprehensif. Untuk menjangkau sasaran yang luas, modul dikembangkan dalam berbagai tingkat kompetensi, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, dengan cakupan materi yang beragam, antara lain pengelolaan keuangan, investasi, serta perlindungan terhadap risiko digital. Dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan kelompok sasaran, mendorong terciptanya inklusi keuangan yang berkualitas, serta memperkuat pemberdayaan konsumen. Dari perspektif keuangan berkelanjutan, peningkatan literasi dilakukan merujuk pada buku Edukasi Ekonomi-Kuangan Hijau (EKH) berjudul "Ekonomi Hijau Indonesia: Jalan Menuju Masa Depan Berkelanjutan". Buku ini disusun sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman industri keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif, buku ini menyampaikan optimisme bahwa ekonomi hijau merupakan arah strategis pembangunan Indonesia yang berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan melalui pembahasan



yang ringkas namun komprehensif mengenai urgensi perubahan iklim, konsep ekonomi dan keuangan hijau, ekonomi sirkular, pembiayaan berkelanjutan, kebijakan serta isu strategis, dinamika transisi menuju ekonomi hijau, hingga arah pembangunan Indonesia menuju *Net Zero Emission* dan Indonesia Emas 2045.

**Seluruh program ekonomi dan keuangan yang inklusif serta berkelanjutan dilaksanakan melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.** Pemangku kepentingan ini termasuk

kementerian/lembaga, Pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, jangkauan program diharapkan semakin luas, implementasi menjadi lebih tepat sasaran, serta dampak dan manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat di berbagai lapisan.